

Multy sector collaboration dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang

Muhammad Fajrin Maulana¹, Muhammad Shaddam R. M², Muhammad Kamil³

¹Universitas Muhammadiyah Malang

²Universitas Muhammadiyah Malang

³Universitas Muhammadiyah Malang

Email: maulanafajriin21@google.com (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

*Multy Sector
Collaboration,
Otonomi Daerah,
UMKM*

Abstrak

Pengembangan UMKM *multy sector collaboration* yaitu pengembangan UMKM yang bekerja sama diberbagai bidang atau sektor untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat mengembangkan kerjasama UMKM dalam berbagai bidang (*multi sector collaboration*) untuk mencapai tujuan yang ditentukan, atau untuk meningkatkan perekonomian kabupaten Malang. Multy sector collaboration sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya kolaborasi/kerjasama, maka kemungkinan keberhasilan suatu usaha yang akan atau sedang dijalankan akan meningkat lebih pesat daripada dijalankan sendiri-sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah melalui berbagai sektor seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, Badan Usaha Milik Negara, serta bank dan lembaga keuangan non bank, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan.

Keywords

*MultiSector
Collaboration,
Regional Autonomy,
UMKM*

Abstract

UMKM development multi sector collaboration, namely the development of UMKM that work together in various fields or sectors to overcome problems faced or to achieve common goals. The government can develop UMKM cooperation in various fields (multi-sector collaboration) to achieve the specified goals, or to improve the economy of Malang district. Multi sector collaboration is very important to do, because with collaboration/cooperation, the possibility of the success of a business that will be or is being run will increase more rapidly than being run alone. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data was collected using observation and interview techniques. The data analysis technique is using data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the results of this study, the Government through various sectors such as the Ministry of Cooperatives, the

Ministry of Industry and Trade, Bappenas, State-Owned Enterprises, as well as banks and non-bank financial institutions, the government has made various efforts to realize the development of small, medium and micro enterprises. In this case, good cooperation between the government and the SME sector in the empowerment process is very necessary, so that the empowerment program is not one-sided.

Pendahuluan

Menurut data pada tahun 2017 (Aprilia & Rini, 2020), industri UMKM di Kabupaten Malang mencapai 419.882 unit dan omzet UMKM di Kabupaten Malang menyentuh angka Rp. 41,8 miliar, kemudian juga UMKM di Kabupaten Malang mampu menyedot tenaga kerja hamper 1,3 juta penduduk yang ada di daerah tersebut.,ada beberapa faktor yang membuat sulitnya UMKM di Kabupaten Malang berkembang, yaitu: Penjualan menurun karena daya beli masyarakat yang anjlok, Kesulitan bahan baku, Distribusi terhambat, Penguasaan teknologi yang lemah, Kebijakan pemerintah yang belum efektif, Kekurangan modal, Serta para pelaksana usaha mikro mengalami masalah produksi.

Hasil pendataan diketahui total ada 1.327 pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, 268 diantaranya sudah memiliki IUMK, Data DKUM (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kab Malang hingga Juli 2020, menyebutkan pihaknya telah mengeluarkan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) sebanyak 10.824 berkas. Sedangkan sisanya 1.059 belum memiliki IUMK (Izin usaha mikro dan kecil)(Sarwoko, 2009). Ada beberapa langkah yang telah dibuat oleh DKUM Kab. Malang untuk meringankan beban para pelaksana usaha mikro dan kecil ini. Pertama, pendataan melalui sistem link secara online, pendataan tersebut menjadi dasar verifikasi sehingga diketahui pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, pemberian modal untuk mengembangkan usaha. Upaya memberikan pelatihan peningkatan kualitas juga menjadi titik focus pemerintah, bantuan berupa uang juga diberikan kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan menjalankan usahanya, peningkatan pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi produk agar tetap berkembang.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang melalui programnya terus memberikan dorongan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, penguatan kelembagaan koperasi dan pengawasan. Pelatihan untuk UMKM sebanyak 4. 250 yang terdiri dari pelatihan kenaikan mutu, pengembangan usaha, penumbuhan wirausaha baru serta temu bisnis. Sebaliknya dari zona permodalan grupnya mendesak lewat 2 komponen ialah Non Perbankan melewati UPT BLUD Dana Bergulir, BLU LPDB KUMKM, serta CSR dan dari Perbankan melewati Program KUR, Kredit Luar biasa Mikro, Mikro serta Kecil (Marchianti et al., 2017).

Menurut(World Health Organisation, 2006), multi sector yaitu:

“Mutisectoral means something that consists of many sectors. When we talk on Multi-sectoral approach, it is in an approach in which we try to address the problem from various angles.”

Multi-sektoral berarti sesuatu yang terdiri dari banyak sektor. Ketika kita berbicara mengenai pendekatan Multi-sektoral, itu adalah pendekatan di mana kita mencoba mengatasi masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian, jika kita tarik pengertian dari hal tersebut, *multy sector collaboration* artinya gabungan dari beberapa sektor yang berbeda yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan UMKM *multy sector collaboration* yaitu pengembangan UMKM yang bekerja sama diberbagai bidang atau sektor untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan bersama.

Pengembangan UMKM *multy sector collaboration* bisa berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk menyusun dan mengelola sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah menggambarkan tugas yang diamanatkan oleh UUD1945, dan Perubahan Kedua Tahun 2000 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang dirumuskan secara khusus untuk mengatur pemerintahan daerah (Bai et al., 2012). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang sangat baik bagi setiap daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kabupaten memiliki hak untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya lokalnya sendiri (Setiaji and Adi 2007). Seperti Kabupaten Malang. Pemerintah dapat mengembangkan kerjasama UMKM dalam berbagai bidang (*multi sector collaboration*) untuk mencapai tujuan yang ditentukan, atau untuk meningkatkan perekonomian kabupaten Malang.

Multy sector collaboration sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya kolaborasi/kerjasama, maka kemungkinan keberhasilan suatu usaha yang akan atau sedang dijalankan akan meningkat lebih pesat daripada dijalankan sendiri-sendiri. Seperti yang dikatakan dalam sebuah jurnal, “The need for collaboration arises from the diverse nature of the problem of road traffic injuries. The problem has multiple determinants, affects many people and sectors, and requires action by different sectors(Marquez, 2013). Kebutuhan akan kolaborasi muncul dari sifat yang beragam seperti masalah kecelakaan lalu lintas jalan. Masalahnya memiliki banyak faktor penentu, mempengaruhi banyak orang dan sektor, dan membutuhkan tindakan dari berbagai sektor” (*Multisectoral collaboration*).

Multy Sector Collaboration adalah Kolaborasi oleh Semua pihak yang memiliki kesamaan visi, tujuan, strategi dan kegiatan, tetapi memiliki hak untuk membuat keputusan independen dan mengelola organisasi, bahkan jika mereka tunduk pada kesepakatan bersama(Dewi, 2019). Ada beberapa standar, yaitu: Forum diprakarsai oleh publik, tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lembaga atau lembaga publik,Peserta lembaga atau forum publik. Organisasi, Forum bertujuan untuk

mengambil keputusan melalui konsensus. Fokus kerjasama adalah pada kebijakan publik dan manajemen publik (Ekowanti, 2019). Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa ada beberapa pihak yang berkolaborasi untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah agar mencapai tujuan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Perkembangan UMKM Kabupaten Malang

Kata pengembangan yang dikemukakan oleh *J. S. Badudu* sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembangunan adalah suatu proses, cara, dan perilaku pembangunan, dan pembangunan adalah suatu tatanan untuk terus berusaha mengembangkan secara bertahap dan teratur guna mencapai tujuan yang diinginkan (Nurbayan, 2010)

Pembangunan adalah sebuah usaha organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas (Suci et al., 2017). Sementara itu, mengenai pengembangan sektor UMKM, Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah serta Mikro menarangkan kalau esensi pembangunan merupakan upaya yang dicoba oleh pemerintah, pemerintah wilayah, dunia usaha serta warga buat memberdayakan usaha mikro. Usaha Kecil serta Menengah Usaha kecil serta menengah meningkatkan serta tingkatkan keahlian serta energi saing usaha kecil, menengah serta mikro dengan membagikan sarana penyuluhan serta pendampingan penguatan.

Hingga saat ini, jumlah UMKM di Jawa Timur kurang lebih 6.825.931 UMKM di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki 2 (dua) kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. UMKM yang paling banyak menarik tenaga kerja berada di Kabupaten Malang yang berjumlah 826.375 orang (Putri E, 2017). Sehingga potensi UMKM di Jawa Timur memiliki daya tarik yang besar dalam mendorong perekonomian masyarakat serta juga penyerapan tenaga kerja sangat banyak lebih-lebih di Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Dengan demikian, agar terus berkembang maka perlu didukung dengan pemberian modal, sehingga usaha mengalami peningkatan.

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif direkomendasikan dalam mereancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Sedangkan sumber data berasal dari sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, contoh dari perolehan data ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun perolehan data ini langsung melakukan wawancara bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Data Sekunder adalah data yang berdasarkan dari sumber yang telah ada, karena dari referensi-referensi ini penulis gunakan untuk bahan penguat penelitian dan sebagai pegangan dalam melihat penelitian

terdahulu dengan pembahasan yang sama. Sebagai contoh Undang-undang Peraturan Pemerintah, jurnal dan buku. Adapun teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian sebelum mengkaji hal yang ingin diteliti dan peneliti wajib mendapatkan data terlebih dulu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Model ini merupakan strategi analisis yang umum dan mengandung prioritas tentang apa yang dianalisis dan mengapa. Ada beberapa bagian yang harus di kaji dalam interaktif Miles dan Huberman, yaitu: (Miles & Huberman, 2002) Miles dan Huberman menjelaskan “reduksi data merupakan proses pilihan data yang dibutuhkan dan diperlukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.” (Miles & Huberman, 2002). Adapun data yang ingin di reduksi peneliti ialah berkaitan dengan sector apasaja yang bekerjasama dalam pengembangan UMKM kabupaten Malang. Data-data itu nantinya berkaitan dengan gambaran umum tentang pemerintah dalam proses pengembangan UMKM kabupaten Malang. Reduksi data memberikan gambaran yang spesifik dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan Tindakan (Miles & Huberman, 2002). Sehingga adanya penyajian data tentu dapat memudahkan orang untuk memahaminya, bahkan didukung dengan konsep yang dirancang dengan terstruktur. Oleh karena itu, pada proses penyajian data perlu di dukung analisis yang baik, karena dalam hal ini sangat berkaitan sampai tercapai di proses kesimpulan.

Dari semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka perlunya menarik sebuah kesimpulan. Hal ini dilakukan agar alur dari yang diteliti yang berdasarkan sebab akibat akan lebih jelas dan dapat di pahami. Sehingga dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pengembangan UMKM kab. Malang harus butuh beberapasektor pemerintah yang bekerjasama, sebab dengan adanya kerjasama tersebut maka akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang. (Weeks, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Terhadap UMKM

Sebagai bagian dari perekonomian, usaha kecil, menengah dan mikro masih perlu meningkatkan daya saingnya melalui inovasi. Prioritas harus diberikan pada keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas karena ketekunannya yang lebih lama dan jangka waktu yang lebih lama (Suci et al., 2017). Memungkinkan usaha kecil, menengah dan mikro untuk berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga meningkatkan daya saing mereka sendiri. Diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah agar para pelaku komersial koperasi dan anggota usaha kecil, menengah dan mikro dapat terus meningkatkan daya saingnya (Ermalia & M'ruf, 2016) Pemerintah daerah Kabupaten Malang berperan penting dalam pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro, termasuk memajukan usaha kecil, menengah dan

mikro untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh mereka. Koperasi Bupati Malang dan Kementerian UMKM telah mendaftarkan UMKM Kabupaten Malang sebagai penerima bantuan sentra.

Namun realisasinya tidak bisa dipantau karena dalam hal ini dilakukan melalui lembaga perbankan, BRI dan BNI. Sejauh ini Kabupaten Malang memiliki 425.061 usaha kecil, menengah dan mikro, termasuk 252.075 pelaku usaha dalam kategori mikro, 172.109 usaha kecil dan 1.377 usaha menengah, dengan total penyerapan tenaga kerja 630.188 (Tirtana et al., 2020). Menurut data bank penyalur bantuan, jumlah usaha kecil, menengah dan mikro yang telah menerima dana mencapai 60%, dengan nilai nominal lebih dari 36 miliar rupiah. Rata-rata, usaha kecil, menengah dan mikro bergerak di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, perdagangan, katering dan perhotelan, konstruksi, keuangan, dan industri pengolahan. Selain memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, Koperasi Bupati Malang dan Dinas Usaha Mikro juga melakukan kegiatan mitigasi bagi UMKM, antara lain restrukturisasi kredit, relaksasi pajak, bantuan sosial, subsidi bunga kredit/pinjaman, dan penundaan pembayaran biaya rencana stimulus pembayaran bantuan modal.

Usaha kecil, menengah, dan mikro merupakan sektor yang penting dan memiliki kontribusi penting bagi terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Usaha kecil, menengah, dan mikro diharapkan dapat berperan serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu usaha kecil, menengah, dan mikro perlu dilindungi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Pengawasan terhadap usaha kecil, menengah dan mikro yang terkait dengan produsen dan industri perbankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah akan mendorong peran usaha kecil, menengah dan mikro dalam perekonomian. Seperti yang dikatakan George. J. Stigler (Usaha & Kur, n.d.) percaya bahwa "peraturan adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh komunitas atau sekelompok orang."

Manfaat pengawasan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari pihak pemerintah sebagai regulator dan pihak pengusaha sebagai objek izin. Bagi pemerintah, izin diperlukan untuk memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat umum. Bagi pengusaha, perizinan harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi dan kebijakan. Penilaian kebijakan tidak cuma menciptakan kesimpulan menimpa berapa jauh permasalahan yang sudah terselesaikan, namun berikan masukan pada klarifikasi serta kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, menolong dalam penyesuaian, serta formulasi kembali permasalahan.

Pemerintah melalui berbagai sektor seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, Badan Usaha Milik Negara, serta bank dan lembaga keuangan non bank, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro (Soko Wikardojo, 2019). Agar mereka menjadi kuat, mandiri, dan cakap. Pembangunan untuk mewujudkan

perekonomian nasional yang tangguh, serta memberikan fasilitas dan insentif lainnya. Selain itu, upaya tersebut memerlukan banyak dukungan atau bantuan, seperti pengadaan alat produksi dan bentuk bantuan lain berupa pembelian bahan, serta metode, mekanisme, dan prosedur yang memadai, efektif, dan aplikatif, memimpin terhadap keberlakuan pelaksanaan dan upaya usaha. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, kemampuan masyarakat sebagai unsur pelaku usaha, berupa usaha kecil, menengah dan mikro.

Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mengharuskan Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri (BUMN) buat menyisihkan 1- 5% laba industri untuk Pembinaan Usaha Kecil serta Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkannya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Riset oleh Sri Adiningsih (2003: 4) dipaparkan kalau mayoritas BUMN memilah persentase terkecil, ialah 1% dari labanya, sedangkan itu banyak UMKM yang mengaku kesusahan mengakses dana tersebut. Tidak hanya itu kredit perbankan pula susah buat diakses oleh UMKM, di antara lain sebab prosedur yang rumit dan banyaknya UMKM yang belum bankable. (Acquah, 2011)

Program Pengembangan UKM Di Kabupaten Malang

Berbagai upaya pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro di Kabupaten Malang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang sangat umum, yang melibatkan nilai-nilai di semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa, tokoh agama, tokoh budaya hingga pejabat tertinggi desa. Seluruh potensi masyarakat khususnya di Kabupaten Malang harus diupayakan secara lebih maju. Disebutkan konsep pengakuan peran sektor usaha kecil, menengah dan mikro, terutama sektor-sektor yang berbasis ekonomi kerakyatan. Langkah yang harus ditempuh dapat diwujudkan dalam dua cara. kegiatan, dan kedua, dengan Menjaga kedaulatan konsumen. Melalui model ini diharapkan baik produsen maupun konsumen sama-sama berwenang (Oktafia & Hidayat, 2018)

Upaya pemberdayaan UMKM yang lepas dari permasalahan yang ada, khususnya di Kabupaten Malang, bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM dan memungkinkan UMKM lebih berperan dalam kancah perekonomian nasional (Sulistyo, 2010). Selama ini, pemberdayaan seringkali terjerumus ke dalam bias pemberdayaan. Prasangka pertama adalah setelah melihat praktik di lapangan, praktik pemberdayaan UKM lebih menitikberatkan pada bantuan materi (modal) daripada keterampilan teknologi dan manajemen. Model dan asumsi seperti ini biasanya menyebabkan pemborosan sumber daya dan dana untuk pekerjaan otorisasi karena tidak terlalu memperhatikan semua aspek teknologi dan keterampilan manajemen. Prasangka kedua adalah menganggap bahwa pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya di Kabupaten Malang merupakan rencana dari tingkat yang lebih tinggi (dari pemerintah), dan orang yang diberdayakan bukanlah titik sentral pelaksanaan. Dalam kaitannya dengan bias kedua ini paling utama di Kabupaten Malang, kerap kali proyek

pemberdayaan habis, hingga habislah program pemberdayaan. Bias ketiga, sebagaimana kita tahu kalau sebgaiian besar zona. Dalam perihal ini kerjasama yang baik antara pemerintah serta sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat dibutuhkan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitanya dengan bias kedua ini paling utama di Kabupaten Malang, kerap kali proyek pemberdayaan habis, hingga habislah program pemberdayaan. Bias ketiga, sebagaimana kita tahu kalau sebgaiian besar zona.

Oleh karena itu, mereka harus dibimbing dan dibimbing, bahkan jika mereka terlibat, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam rencana tersebut. Terpisah dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan, maka dimasa depan profil pengusaha Indonesia harus diubah modelnya menjadi model belah ketupat (Akuntansi et al., 2019). Dimana secara konkret mayoritas para pengusaha adalah lapisan menengah, lapisan bawah harus mampu terangkat menjadi lapisan menengah yang menduduki porsi mayoritas. Kondisi demikian akan mengurangi dampak kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lebih penting lagi, bagaimana mengubah model ini. Determinan modifikator melibatkan berbagai isu terkait industrialisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan perbaikan sistem (model) pengembangan usaha. Jika semua ini dilandasi oleh semangat idealis yang mencerminkan persatuan kita sebagai negara, maka semua itu akan terlaksana dengan baik. (Ekowanti, 2019)

Simpulan

Pembangunan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan sudah harus menjadi komitmen bersama secara nasional demi masa depan bangsa ini. Terutama di Kabupaten Malang dari pengamatan data dilapangan ternyata peran sektor UKM di era reformasi ini cukup mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menyelematkan kondisi perekonomian yang telah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi bila disbanding dengan peran para konglomerat atau pengusaha besar dalam mempertahankan struktur ekonomi. Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya UKM di Kabupaten Malang maka program pengembangan UKM berupaya untuk memecahkan akar permasalahan dengan berbagai macam program dan model pembinaan. Program pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan berusaha merubah model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat lewat determinan industrialisasi, pendidikan dan pengembangan ketrampilan.

Selanjutnya langkah-langkah efektif dalam upaya mengatasi permasalahan UKM di Kabupaten Malang antara lain dengan : penciptaan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, adanya perlindungan usaha dari pemerintah, diusahakan adanya pengembangan program kemitraan, diadakan pelatihan, membentuk lembaga-lembaga khusus, pemantapan asosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama yang setara dsb.

Referensi

- Acquah, F. (2011). No Title66, עלון הנושע, תמונת מצב. ענף הקיזוי: תמונת מצב. (July), 37–39.
- Akuntansi, P., Library, N., & Found, S. (2019). *0 % Quotes 0 % Exclusions*.
- Bai, P., Ajil, B., Pengaruhnya, D. A. N., & Umkm, M. (2012). *Pembiayaan bai' bitsaman ajil dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm)*.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Ni Luh Yulyana Dewi. *Ilmu Dinamika Sosial*, 3(2).
- Ekowanti, M. R. L. (2019). *Collaborative Governance in MSMEs Development (Case Study: Collaboration Model of Surabaya Local Government, Private, and MSMEs Association in MSMEs Development at Coastal Area of Surabaya)*. 2281787. <https://doi.org/10.4108/eai.7-12-2018.2281787>
- Ermalia, terry L., & M'ruf, F. (2016). Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Kajian Otonomi Daerah*, 01(01), 1–10.
- Marchianti, A., Nurus Sakinah, E., & Diniyah, N. et al. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.
- Marquez, P. (2013). The Challenge of Non-Communicable diseases and Road Traffic Injuries. *World Bank Report*.
- Nurbayan, Y. (2010). Pengembangan Materi Ajar Balaghah Berbasis. *Bahasa Dan Seni*, 38(1), 107–116.
- Oktafia, R., & Hidayat, A. R. (2018). Penguatan Kapasitas Pelaku Bisnis Mikro Melalui Penataan Pengelolaan Keuangan Usaha: Pandangan Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.2090>
- Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara*, 5(1), 5431–5445.
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm. *Modernisasi*, Vol 5, 172–188.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X, June*, 1–29.
- Soko Wikardojo. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Sulistyo. (2010). Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Basis Kerakyataan di Kabupaten Malang. *Ekonomi Modernisasi*, 6(1), 58–73.
- Tirtana, A., Zulkarnain, A., Kristanto, B. K., Suhendra, S., & Hamzah, M. A. (2020). Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 14(2), 101. <https://doi.org/10.32815/jitika.v14i2.473>
- Usaha, K., & Kur, R. (n.d.). *Perizinan Di Sektor Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk)*. 142–

156.

Weeks, D. P. C. C. L. E. Y. N. to K. in 20. (2015). Metodologi Penelitian. *Dk*, 53(9), 1689–1699.

World Health Organisation. (2006). Multisectoral collaboration. *World Health*, 12.